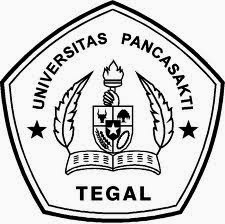
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PROBLEMATIKA PUTUSNYA HUBUNGAN ORANG TUA ANGKAT**

****

**SKRIPSI**

**Mengajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

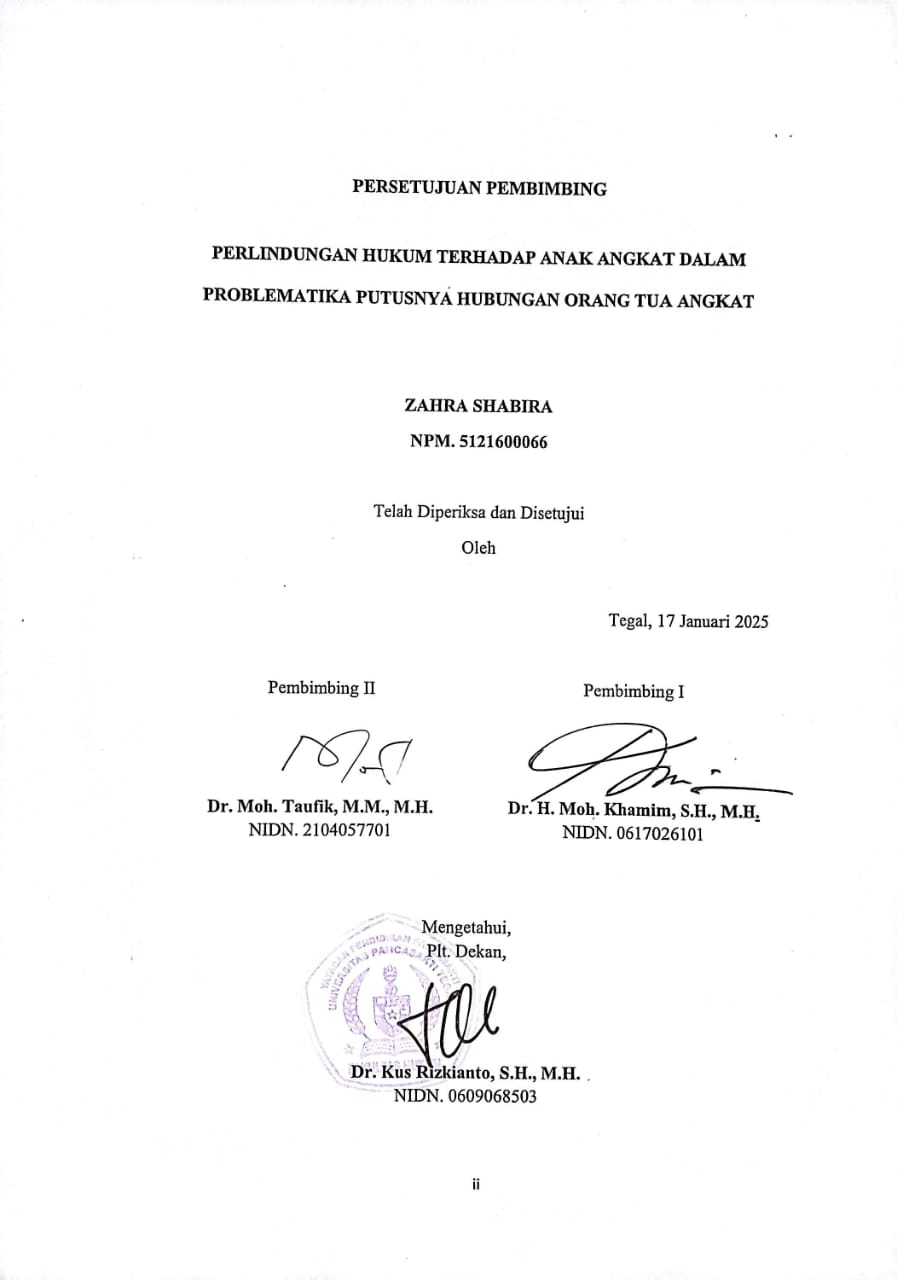
**ZAHRA SHABIRA**

**NPM 5121600066**

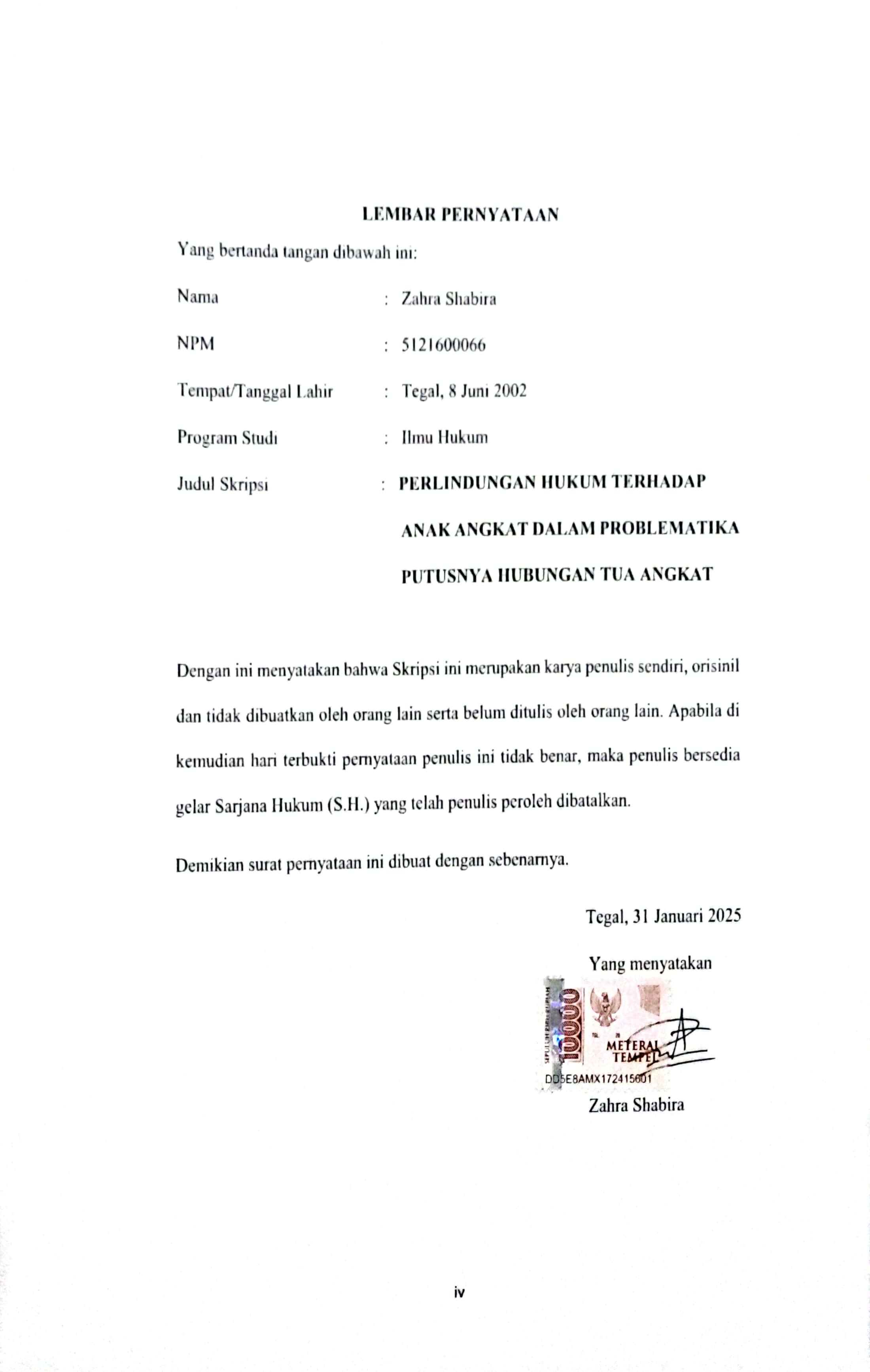
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

**ABSTRAK**

Anak angkat adalah anak yang hak dan kewajibannya dialihkan dari orang tua kandung kepada orang lain atau disebut dengan orang tua angkat. Anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak. Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan penetapan pengadilan agar perlindungan hukum terhadap anak aman dan terjamin. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penelantaran anak, kekerasan maupun penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual. Banyak faktor pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat, salah satunya sebagai pancingan orang tua angkat agar dapat memiliki anak secara biologis dimasa depan. Namun seringkali pengangkatan anak tidak sesuai dengan harapan. Permasalahan ini sering terjadi diantara kedua belah pihak, yang mengakibatkan peristiwa hukum baru yaitu pembatalan pengangkatan anak. Akibat dari pembatalan pengangkatan anak tersebut maka hak dan kewajiban anak bukan tanggung jawab orang tua angkatnya lagi, melainkan tanggung jawab orang tua kandungnya. Perlindungan hukum akibat peristiwa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak harus jelas karena anak adalah sebagai generasi bangsa muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dan calon pemimpin harus mendapat kesempatan yang layak untuk berkembang secara rohani, fisik, dan sosial.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam problematika putusnya hubungan orang tua angkat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang datanya diperoleh dari buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi, dan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat mengetahui adanya peraturan hukum yang melindungi anak angkat dan dapat mengetahui proses pembatalan pengangkatan anak dari kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 31/Pdt/G/2022/PN. Njk. Dalam putusan tresebut dapat diketahui setelah terjadinya putus hubungan orang tua angkat dan anak angkat, maka hak dan kewajiban anak angkat kembali ke orang tua kandung.

**Kata Kunci :** Anak Angkat, Perlindungan Hukum, Pembatalan Anak Angkat

**ABSTRACT**

*An adopted child is a child whose rights and obligations are transferred from their biological parents to another party, referred to as the adoptive parents. An adopted child holds the same status as a biological child. The purpose of adoption is to ensure the welfare of the child. Adoption must be conducted in accordance with regulations and court rulings to ensure that legal protection for the child is safe and guaranteed. This also aims to prevent neglect, violence, and suffering in physical, psychological, and sexual forms. There are many factors that lead to adoption by society, one of which is as a means for adoptive parents to potentially have biological children in the future. However, often the reality of adoption does not meet expectations. This issue frequently arises between both parties, resulting in a new legal event known as the annulment of adoption. As a consequence of the annulment of adoption, the rights and obligations of the child are no longer the responsibility of the adoptive parents but revert to their biological parents. Legal protection regarding this event is regulated under Law No. 23 of 2002, which has been amended by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. Legal protection for children must be clear because children are the young generation who will carry on the noble ideals of the nation and future leaders who must be given adequate opportunities to develop spiritually, physically, and socially.*

*This research also aims to understand legal protection for adopted children in the context of issues arising from the termination of relationships with adoptive parents. This type of research employs library research with a normative research approach. The data sources used in this study are secondary data obtained from books, legal journals, theses, and legislation. The data analysis used in this research is qualitative data analysis. The results of this study reveal existing legal regulations that protect adopted children and provide insights into the process of annulment of adoption based on the case in Decision No. 31/Pdt.G/2022/PN.Njk. In this ruling, it can be seen that after the termination of the relationship between adoptive parents and adopted children, the rights and obligations of the adopted child revert back to their biological parents.*

***Keyword* :** *Adopted Children, Legal Protection, Cancellation of Adopted Children*

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persebahan kepada:

1. Bapak Heri Rusdiyanto dan Ibu Sri Rahayu, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Starat I dalam Ilmu Hukum.
2. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi serta mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
3. Teman-teman terdekat penulis, Ghina Mufidah, Annisa, Fiqih Annisa Ramadhini, Elmira Aisya Fani, Nurul Oktafiyani yang telah berkenan menjadi teman terdekat penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
4. Teman-Teman penulis, Nanda Maharani, Erlinda Dian Pratiwi, Dwi Ayuda, Laras Ayu Januari Putri, Salisya Putri Yuana, Mitta Auli Maharani, Tiffani Valencia Muliana, Vivi Novita, Febby Ayu Safitri, Ajeng Sartika, yang telah berkenan memberi dukungan dan menemani penulis saat mengerjakan skripsi ini.
5. Teman-Teman KKN Desa Paweden, Anggraena Jahara Kusdinar, Vega Syafa Salsabila, Ghina Mufidah, Muhammad Irsyad Syahril Aalaai, Imam Mustofa Syaefulloh, Toat Nur Alimudin, Moch. Fachrul Rozy yang telah memberikan dukungan untuk pembuatan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu memberikan dukungan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Diri sendiri yang telah berjuag dan berusaha selama ini.

**MOTTO**

“*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi”.*

(QS. Al-Qashas: 77).

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *alhamdulillah*penyusunan skripsi ini dapat selsesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan teima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Taufik, M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Starta 1 mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dukungan moril pada penulis dalam menempuh studi
10. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal 17 Januari 2025

**Zahra Shabira**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL i**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii**

**HALAMAN PENGESAHAN iii**

**HALAMAN PERNYATAAN iv**

**ABSTRAK v**

***ABSTRACT* vi**

**PERSEMBAHAN vii**

**MOTTO ix**

**KATA PENGANTAR x**

**DAFTAR ISI xii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Tujuan Penelitian 10
4. Urgensi Penelitian 10
5. Tinjauan Pustaka 10
6. Metode Penelitian 13
7. Sistematika Penulisan 16

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 17**

1. Tinjauan Umum Tentang Anak Ankat 17
2. Definisi Anak Angkat 17
3. Faktor-Faktor Terjadinya Pengangkatan Anak 22
4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Di Indonesia 26
5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak33
6. Definisi Perlindungan Anak 33
7. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 39
8. Hukum Perlindungan Anak 40
9. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak Dalam

Berbagai Perspektif 42

1. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata 42
2. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam 46
3. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat 53

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61**

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam

Problematika Putsnya Hubungan Orang Tua Angkat 61

1. Implementasi Putusan Pengadilan Nomor

31/Pdt.G/2022/PN.Njk Dalam Pembatalan Anak Angkat69

**BAB IV PENUTUP 77**

1. Kesimpulan 77
2. Saran 78

**DAFTAR PUSTAKA 79**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan atau pernikahan menurut “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan/pernikahan merupakan momen yang begitu dinantikan oleh banyak orang karena berbagai alasan, mulai dari membangun keluarga hingga mencari kedamaian dan kenyamanan dalam hidup. Dengan memahami tujuan dan makna perkawinan, pasangan diharapkan dapat menjalani kehidupan berumah tangga yang lebih harmonis dan penuh berkah. Membangun keluarga yang rukun, makmur, dan penuh kebahagian adalah tujuan utama perkawinan/pernikahan.[[1]](#footnote-1) Namun, tujuan utama lainnya adalah untuk memiliki keturunan yang sah. Semua pasangan suami istri pasti sangat menantikan kehadiran seorang buah hati atau anak.

Anak ialah anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa(YME), dipandang sebagai aset yang paling berharga di dunia karena di dalamnya tertanam kehormatan, martabat, dan hak-hak tiap orang yang harus kita lindungi setiap saat. Anak-anak perlu diberikan peluang yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual, fisik dan sosial karena mereka adalah para pemimpin masa depan negara ini dan generasi berikutnya yang akan melaksanakan cita-cita bangsa. Mereka mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak sipil serta kebebasan. Hal ini harus dilakukan oleh masyarakat karena masih banyak kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”.

Memiliki seorang anak dalam sebuah keluarga sangat penting karena sudah merupakan naluri setiap orang, bahkan beberapa keluarga tertentu sering mengalami kecemasan atau ketakutan karena tidak memiliki anak. Ketakutan ini yang mendorong beberapa suami istri untuk memiliki anak secara tidak natural, yaitu melalui mengambil anak orang lain atau dari hubungan kekerabatan. Hal ini sering dikenal sebagai adopsi atau pengangkatan anak dalam peraturan perdata barat. Pengangkatan anak tidak baru di Indonesia, banyak pasangan telah melakukannya dengan berbagai alasan. Pasangan suami istri dapat memilih untuk adopsi atau pengangkatan anak karena banyak faktor selain faktor bilogis. Faktor lainnya: orang tua kandung anak angkat memiliki masalah pada perekonomian, memberikan teman kepada anak biologis dari orang tua angkatnya, dan faktor budaya lainnya. Faktor budaya yang hingga ini dipercayai oleh warga yaitu anak angkat akan dijadikan sebagai pancingan, sehingga memungkinkan orang tua angkatnya akan memiliki anak secara biologis di masa depannya. Hal ini memang masih dipercaya di beberapa daerah saja.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam “Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa” :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan ke keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Oleh karena itu, adopsi harus diselesaikan dengan bijak demi kesejahteraan anak dan mematuhi semua aturan hukum terkait. Pengangkatan anak juga harus melalui prosedur yang benar untuk menghindari penyimpangan yang terjadi pada masyarakat. Karena tidak adanya prosedur yang tepat, maka dapat menyebabkan pemalsuan data, kekerasan terhadap anak, atau bahkan perdagangan anak.

Di Indonesia, ada dua jenis anak angkat yaitu[[2]](#footnote-2): yang pertama, adalah orang tua angkat yang mengasuh anak dari keluarga lain yang kesulitan keuangan. Dalam situasi seperti ini, anak angkat biasanya tidak dimasukkan ke dalam struktur kerabat orang tua angkat. Mereka tetap menerima fasilitas dan dukungan yang memadai, seperti pendidikan sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang cerah. Orang tua angkat dan anak angkat memiki ikatan yang memungkinkan warisan apabila salah satu dari mereka wafat dunia, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Yang kedua : dalam jenis pengangkatan penuh, anak angkat dimasukkan ke dalam keluarga inti orang tua angkat sebagai bagian intergal. Dalam keadaan seperti ini, anak angkat diperlukan dan mempunyai hak yang sama dengan anak biologis. Mereka juga mempunyai hak sebagai ahli waris.

Seringkali, tujuan pihak yang mengajukan adopsi anak tidak sesuai dengan harapan. Permasalahan ini sering terjadi antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan peristiwa hukum baru yaitu pembatalan adopsi anak yang telah diputuskan di pengadilan sebelumnya. Meskipun permasalahan pembatalan adopsi anak sudah banyak terjadi di masyarakat, namun hingga sekarang Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur pembatalan adopsi anak.[[3]](#footnote-3) Pembatalan adopsi anak dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya ketidakseimbangan hak dan tanggung jawab antara orang tua angkat dan anak adopsi maupun sebalikya. Permasalahan pembatalan adopsi anak sering muncul dan ada yang diajukan dibeberapa pengadilan terutama pengadilan umum. Oleh karena itu, orang tua menginginkan megadopsi atau mengangkat anak harus memenuhi persyaratan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, pada “Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa” :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Melepaskan atau mengalihkan seorang anak dari orang tua biologis ke orang tua angkatnya disebut pengangkatan anak. Orang tua angkatnya bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan anak angkatnya. Pengangkatan anak termasuk sebuah perbuatan hukum karena merupakan tindakan yang diatur secara hukum dan mengakibatkan hukum berupa hak dan tanggung jawab orang tua angkatnya. Dengan demikian, Pasal 1 angka (2) dari Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 54 Tahun 2007 menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan dan hak anak angkat.

Anak angkat berhak untuk menerima perlindungan demi kesejahteraannya di masa depan. Di Indonesia telah menetapkan pengaturan hukum untuk melindungi kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak anak angkat. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak”, yang telah mengalami perbaruan pada UU Nomor 35 Tahun 2014, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang “Kesejahteraan Anak”, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang “Persyaratan Pengangkatan Anak”. Seorang anak harus diangkat setelah melalui prosedur hukum dan persetujuan Pengadilan Negeri dan beberapa syarat, seperti persetujuan orang tua kandung (jika ada) dan rekomendasi dari instansi yang berkaitan. Pasangan suami istri bukan satu-satunya yang bisa mengadopsi anak, seseorang yang masih lajang juga dapat melaukannya. Merawat anak memerlukan motivasi yang kuat.

Pengangkatan anak harus sesuai keputusan atau penetapan pengadilan seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka (1). Adopsi anak tidak hanya sebatas merawat anak orang lain, namun tetap ada aturan hukumnya. Meski demikian, banyak orang tua yang tetap mengadopsi anak tanpa melalui keputusan pengadilan. Hal ini seringkali terjadi karena ketidaktahuan hukum di dalam masyarakat. Terdapat beberapa tahapan dalam pengangkatan anak.

Pemohon atau orang tua angkat saat melaksanakan pengangkatan anak/adopsi harus melalui tiga tahap, yaitu:[[4]](#footnote-4)

1. “Tahap persiapan untuk pengangkatan anak”
2. “Tahap sidang pengangkatan anak”
3. “Tahap pencatatan pengangkatan anak”

Seseorang harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri(PN) yang mencakup wilayah dimana anak angkat akan diaopsi untuk memulai proses pengangkatan anak. Seseorang yang akan melakukan adopsi anak harus menyertakan surat izin tertulis dari menteri sosial, jika sebuah yayasan sosial merawat anak yang berkaitan. Surat izin ini menunjukkan bahwa yayasan sosial tersebut memiliki izin untuk bergerak dibidang pengangkatan anak. Prosedur ini sangat penting dilakukan setiap pengangkatan anak, karena setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara. Apabila prosedur ini tidak dilakukan, maka keselamatan anak yang diadopsi dipertaruhkan.

Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007, terdapat prinsip-prinsip pengangkatan anak yaitu :[[5]](#footnote-5)

1. “Memenuhi kebutuhan anak dan mematuhi aturan hukum”.
2. “Agama yang dipegang oleh anak angkat dan calon orang tua angkat dan anak angkat harus memiliki kesesuaian”.
3. “Asal-usul anak yang tidak jelas harus sesuai dengan mayoritas penduduk setempat”.
4. “Tidak memutus/mengehentikan ikatan darah antara orang tua kandung dan anak angkat”.

Apabila latar belakang anak tidak jelas maka agama yang dianut sesuaikan dengan banyaknya masyarakat setempat. Masyarakat setempat tersebut dimaksudkan berada di tingkat desa atau kelurahan . Anak angkat juga wajib mengetahui siapa orang tua biologis. Namun, harus tetap memperhatikan kesiapan anak saat memberitahu asal-usul orang tua kandungnya.

Salah satu kasus yang terkait dengan problematika putusnya hubungan orang tua angkat dan anak angkat adalah pada keluarga Sakinah dan Pariyadi. Pasangan suami istri tersebut telah melakukan pengajuan permohonan pengesahan anak atas seorang anak perempuan yang diberi nama Binti Nurcahyani (Tergugat III) pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan penetapan Nomor 06/Pdt.P/PN/Njk. Binti Nurcahyani (Tergugat III) merupakan anak kandung dari pasangan Sakiman (Tergugat I) dan Wiwik Wijayanti (Tergugat II). Bahwa Penggugat dan Suami Penggugat saat masih hidup telah sepakat dengan Tergugat I dan II, bahwa anak kandung Tergugat I dan II diambil Penggugat untuk dijadikan sebagai anak angkat.

Penggugat dan Suami Penggugat setelah menerima pengangkatan tersebut memiliki rasa penuh tanggung jawab, merawat, mengasuh, dan memberikan pendidikan dan kesejahteraan pada anak angkat, dengan memberikan sarana dan fasilitas yang cukup disertai dengan kasih sayang yang tulus. Namun, Penggugat tidak mengetahui siapa orang yang telah memberitahukan mengenai hak ikhwal posisi orang tua kandung Tergugat III, padahal Penggugat tidak pernah memberitahukan tentang status orang tua kandung Tergugat III. Hal tersebut dikarenakan menurut Penggugat belum waktunya untuk memberitahu orang tua kandung dari Tergugat III. Akibat dari masalah tersebut membuat Tergugat III memilih kembali ke tempat tinggal orang tua kandungnya. Penggugat sangat kecewa atas kejadian tersebut dan merasa gagal untuk membina anak angkat dan juga Penggugat merasa malu pada tetangga. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk.

Anak angkat di Indonesia mempunyai hak yang setara degan anak biologis, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun orang tua angkat dan anak adopsi telah berpisah/putus hubungan, bukan berarti perlindungan pada anak angkat sudah tidak ada lagi. Anak angkat akan tetap mendapat perlindungan, seperti yang sudah diatur dalam UUPerlindungan Anak. Oleh karena itu, Penulis tertarik terhadap permasalahan ini dan menjadikan permasalahan ini sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Problematika Putusnya Hubungan Orang Tua Angkat”.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam problematika putusnya hubungan orang tua angkat ?
3. Bagaimana implementasi putusan pengadilan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk dalam pembatalan anak angkat ?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam problematika putsunya hubungan orang tua angkat dan anak angkat.
6. Mengkaji implementasi putusan pengadilan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk.
7. **Urgensi Penelitian**

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam memahami perlindungan hukum terhadap anak angkat setelah terjadinya pembatalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkatnya. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dan memperluas pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi semua orang yang akan meneliti penelitian serupa. Urgensi penelitian ini juga meningkatkan pemahaman kepada Penulis dan kepada pihak-pihak yang sedang mengalami permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga mereka dapat mengetahui perlindungan hukum bagi anak terhadap problematika putusnya hubungan orang tua angkat.

1. **Tinjauan Pustaka**

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

1. Wisnu Aji Pamungkas dari Fakultas Hukum (Universitas Pancasakti Tegal) dengan judul “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata”.[[6]](#footnote-6)* Skripsi ini membahas posisi anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya menurut hukum perdata, khusunya tentang pembagian harta warisan menurut hukum perdata. Skripsi ini juga mengkaji penyelesaian perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan oleh anak angkat dengan mengambil putusan Nomor 44/Pdt.G/233017/PN Slw. Dalam putusan tersebut Tergugat sebagai anak angkat setelah dewasa tidak menghormati orang tua angkatnya lagi dan ingin menguasai harta milik orang tua angkatnya. Namun, karena sikap Tergugat kepada orang tua angkatnya tidak hormat, Penggugat sebagai ayah angkat membuat surat wasiat. Dalam surat wasiat tersebut menyatakan secara jelas dan bangunan. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan, dimana dalam skripsi di atas mengkaji tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut KUH Perdata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis adalah mengimplementasikan Putusan Pengadilan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk.
2. Iqlima Ratu Genisya dari Fakultas Hukum (Universitas Andalas Padang) dengan judul skripsi *“Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk).”[[7]](#footnote-7)* Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Penulis yaitu skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk pada putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk dan mengkaji alasan orang tua angkat mengajukan pembatalan anak. Sedangkan dalam skripsi Penulis fokus pada perlindungan hukum terhadap anak dalam problematika putusnya hubungan orang tua angkat dan anak angkat. Dalam skripsi Penulis akan menjelaskan beberapa peraturan perlindungan terhadap anak angkat. Menjelaskan mengenai persyaratan dalam melakukan adopsi anak.
3. Adinda Risty dari Fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul skripsi *“Upaya Pembatalan Adopsi Anak Oleh Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan Pengadilan".[[8]](#footnote-8)* Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Penulis yaitu skripsi ini lebih terfokuskan pada pertimbangan hakim dalam putusan gugatan pembatalan adopsi anak serta upaya pembatalan adopsi anak yang dilakukan oleh ayah angkatnya sendiri. Sedangkan penelitian Penulis fokus pada perlindungan hukum anak apabila orang tua angkatnya mengajukan pembatalan adopsi pada anak angkatnya. Skripsi Penulis juga akan menjelaskan mengenai adopsi anak dari berbagai perspektif. Contoh kasus yang Penulis ambil adalah dengan Putusan Pengadilan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. Njk.
4. **Metode Penelitian**
5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research.* Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mempelajari masalah melalui pengumpulan referensi, membaca, mencatat, dan pengolahan materi penelitian secara menyeluruh. Penulis memilih untuk melakukan penelitian ini karena sumber data dapat diperoleh dengan membaca dokumen.[[9]](#footnote-9) Sumber *library research* berupa skripsi, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun buku yang berhubungan dengan judul skripsi Penulis.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in book)* atau berdasarkan norma atau standar yang berlaku di masyarakat.[[10]](#footnote-10) Pendekatan normatif dapat disebut sebagai penelitian tinjauan pustaka dimana sebagian besar sumber datanya dari sumber data yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan baku tersier. Data tersebut sebagian besar berasal dari peraturan atau undang-undang yang berlaku di masyarakat.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya, biasanya dari peneliti sebelumnya atau dari instansi terkait bukan secara langsung dari objek penelitian.[[11]](#footnote-11) Penelitian ini dapat diperoleh dari bahan sumber data seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel. Data sekunder dalam penelitian yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, meliputi :
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
7. Bahan Hukum Sekunder, meliputi :
8. Buku
9. Jurnal-jurnal hukum
10. Artikel, dll.
11. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaa. Metode kepustakaan dilakukan untuk menumpulkan sejumlah data, melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, jurnal, skripsi, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Metode kualitatif dapat digunakan untuk melakukan penelitian tentang sejarah, kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan ekonomi.[[12]](#footnote-12) Hasil dari penelitian kualitatif dapat berupa penjelasan yang mendetail mengenai ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai isi penelitian skripsi ini, berikut ini sistematika penulisan yang ditulis oleh Penulis:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, dalam bab ini menguraikan tinjauan umum tentang anak angkat, pengangkatan anak dalam berbagai perspektif, dan juga menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam problematika putusnya hubungan orang tua angkat dan juga mengimplementasikan Putusan Pengadilan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN. NJk.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini merupakan penutup dari skripsi, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini akan menguraikan simpulan pembahasan penelitian dan saran-saran dari Penulis sehubungan dengan masalah yang diteliti.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat**
2. **Definisi Anak Angkat**

Anak angkat memiliki istilah lain yaitu adopsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak yang diadopsi oleh orang lain dianggap menjadi anak mereka.[[13]](#footnote-13) Maka dalam KBBI, “mengadopsi” artinya secara hukum mengasuh atau mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Istilah “pengangkatan anak” atau “adopsi anak” di Indonesia dianggap sebagai istilah dari *“adoption”* dalam bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dianggap sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung.[[14]](#footnote-14) *“Adoptie/adapteren”*  dalam bahasa Belanda atau *“adoption, adopto”* dalam bahasa Latin yang artinya mengangkat ketika masih anak-anak.[[15]](#footnote-15)

Definisi anak angkat juga dijelaskan dalam “Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa” :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggng jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Definisi diatas dikatakan bahwa anak angkat merupakan anak yang dirawat oleh orang tua ganti atau biasa disebut orang tua ganti. Hak dan kewajiban anak tersebut sudah menjadi kewajiban dari orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi saat proses pengangkatan anak harus didasarkan pada keputusan pengadilan . Hal ini demi perlindungan hukum anak angkat untuk mencegah adanya diskriminasi maupun penelantaran anak.

Definisi anak angkat secara umum merujuk pada anak yang hak-haknya dipindahkan dari keluarga orang tua biologis ke keluarga orang tua angkat, dimana ia dirawat dan diperlakukan layaknya anak kandung. Dengan demikian, anak angkat mempunyai hak dan status yang setara dengan anak biologis. Berbeda melalui definisi adopsi tersebut, Fuad Muhammad Fachruddin mengatakan “anak angkat adalah anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh orang lain untuk diasuh sebagai anak sendiri,[[16]](#footnote-16) anak angkat mengambil nama orang tua angkatnya yang baru, sehingga hubungan nasabnya dengan orang tua aslinya terputus”. Perpindahan milik, pertukaran darah daging dan keturunan secara keseluruhan dikenal sebagai peristiwa pengangkatan anak.[[17]](#footnote-17) Penjelasan itu mengartikan hubungan antara orang tua biologis dan anak biologis telah terputus atau sudah tidak lagi memiliki ikatan kekerabatan.

Orang tua angkat sering kali berusaha menutupi latar belakang orang tua biologis dari anak yang mereka angkat, yang dapat menimbulkan masalah bagi anak tersebut. Akibatnya, undang-undang perlindungan anak mengharuskan orang tua angkat untuk menginformasikan anak angkat tentang asal usul dan orang tua biologisnya. Tentu hal ini harus mempertimbangkan kesiapan mental anak yang bersangkutan dengan memberikan pengertian mengenai psikologis dan agama. Contohnya, hal ini dapat dilakukan setelah anak mencapai usia dewasa atau ketika anak angkat tersebut mendekati pernikahan, terutama jika anak tersebut adalah perempuan. Penjelasan tersebut juga sudah dijelaskan pada Pasal 6 PP tentang Pengangkatan Anak.

Pakar hukum Islam sering menyamakan istilah “anak angkat” dengan istilah *“hadhanah”*. Namun, dalam hukum Islam istilah “anak asuh” yang dianggap sama seperti “pengangkatan anak”. Merujuk pada anak yang dirawat oleh individu atau lembaga dengan tujuan memberikan bimbingan, perawatan, pendidikan, dan perhatian kesehatan.[[18]](#footnote-18) Peristiwa pengangkatan anak atau anak asuh terjadi karena orang tua, atau salah satu dari mereka tidak mampu memastikan pertumbuhan anak dengan baik. Mayoritas orang Arab juga telah melakukan pengangkatan anak yang disebut *“tabanni”*, yang memiliki arti “mengambil anak angkat”.[[19]](#footnote-19) Artinya, individu mengadopsi anak dari orang lain untuk menjadikan anaknya sendiri. Proses ini diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku bagi anak angkat, orang tua biologis, dan orang tua angkat.

Menurut Wahbah al-Zuhal, *“tabanni”* berarti “pengangkatan anak, pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”.[[20]](#footnote-20) Dalam definisi lain, “*tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya, meskipun anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya”. Meskipun dalam Islam, hukum melarang ayah mengingkari nasab anak-anaknya, dan ibu menghubungkan nasab anak bukan pada ayah yang sebenarnya. Dalam Islam, hubungan nasab antara anak dan orang tua biologis tidak akan putus. Pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk membantu kesejahteraan anak.

Menurut Soerjono Wignjodipoero, “Pengangkatan anak adalah pengambilan anak dari orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga timbul hukum kekeluargaan yang sama antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri”.[[21]](#footnote-21) Sedangkan menurut Helman Hadi Kusuma, “Anak adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat menurut hukum adat setempat untuk tujuan kelangsungan keturunan dan pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga”. Anak angkat tidak berbeda dari anak pada umumnya dalam hak, perlakuan, dan tanggung jawab yang dimiliki pada orang tua angkatnya.[[22]](#footnote-22) Anak angkat mendapat perhatian dan kasih sayang yang sama dengan anak kandungnya, meskipun memiliki status hukum dan hubungan darah mereka berbeda. Karena tujuan pertama adanya pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan hidup anak agar mereka dapat hidup secara layak.

Orang tua angkat mempunyai kewajiban mendidik, merawat, dan memberi dukungan emosional terhadap anak angkat, sama seperti yang mereka lakukan terhadap anak kandung mereka. Anak angkat perlu mendapatkan cinta kasih dan perhatian oleh orang tua angkatnya, serta memperoleh pendidikan yang layak dan perawatan kesehatan yang memadai dari orang tua angkat. Anak angkat memiliki hak yang sama seperti anak lainnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan mereka. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Adanya perlindungan anak ini dikarenakan banyak anak yang mendapatkan kekerasan dan penelantaran.

Anak angkat di Indonesia sangat penting untuk dilindungi secara hukum agar memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan memiliki hak-hak dasar mereka. Dengan proses pengangkatan yang legal, penegakan hak-hak anak, dan kesadaran masyarakat, anak angkat dapat tumbuh dalam lingkungan yang nyaman dan membantu perkembangan mereka secara optimal. Pengangkatan anak tanpa prosedur hukum tidak dapat menjamin kesejahteraan yang akan didapatkan oleh anak. Namun tidak hanya itu, karena apabila pengangkatan anak dilakukan dengan ilegal maka dapat berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat.

1. **Faktor-Faktor Terjadinya Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang mendasarinya. Faktor-faktor yang kompleks ini sering kali berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Pengangkatan anak tidak hanya sekedar tindakan pribadi, tetapi juga merupakan keputusan yang melibatkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang mendalam. Faktor-faktor seperti kebutuhan emosional, kondisi sosial ekonomi, serta keinginan untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan menjadi pendorong utama bagi orang tua angkat. Faktor-faktor lainnya antara lain :[[23]](#footnote-23)

1. Untuk mengatasi perasaan kesepian dalam diri atau dalam kehidupan keluarga yang telah dibangun selama bertahun-tahun tanpa ehadiran seorang anak.
2. Untuk mengatasi perasaan kesepian dalam diri atau dalam kehidupan keluarga demi mempertahankan garis keturunan, terutama di negara-negara yang menganut sistem penghormatan kepada leluhur *(voorouderverering)*.
3. Ada keinginan tulus untuk mengasuh dan merawat anak-anak yang terlantar, menderita, miskin, dan lainnya.

Pengangkatan anak juga dipandang sebagai upaya untuk memberikan pendidikan yang layak dan akses terhadap berbagai peluang yang mungkin tidak dapat diperoleh oleh anak-anak dalam situasi sulit. Sehingga orang tua angkat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak. Terdapat banyak alasan dari berbagai pendapat mengenai pengangkatan anak. Dapat dilihat dari pandangan psikologis, sosial, aspek hukum, maupun persepsi budaya. Namun, menurut buku M. Budiarto terdapat beberapa alasan pengangkatan anak dilakukan, antara lain :[[24]](#footnote-24)

1. “Subsidi gaji pemerintah merupakan hal yang ingin diterima oleh PNS”.
2. “Harapan untuk memiliki anak bagi pasangan yang belum dikaruniai anak”.
3. “Harapan dan keyakinan untuk mendapatkan anak biologis setelah mengadopsi atau sebagai pancingan”.
4. “Keinginan untuk memiliki anak tambahan di samping anak yang sudah ada”.
5. “Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, yatim piatu, dan terlantar”.

Menurut buku Djaja S. Meliala mengatakan bahwa terdapat alasan mengapa individu mengangkat anak yaitu :[[25]](#footnote-25)

1. Empati terhadap anak-anak yang terlantar atau yang orang tuanya tidak dapat merawatnya karena alasan kemanusiaan.
2. Ketidakpunyaan anak dan harapan untuk memiliki anak agar dapat dirawat dan dijaga saat mereka menua.
3. Keyakinan bahwa memiliki anak dirumah akan memungkinkan mereka memiliki anak biologis sendiri.
4. Mereka juga dapat menemukan teman untuk anak-anak mereka yang sudah ada.
5. Mereka juga dapat mempertahankan ikatan pernikahan atau kebahagian keluarga.

Lulik menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan karena beberapa alasan, yaitu :[[26]](#footnote-26)

1. Keinginan untuk memiliki anak sebagai pewaris.
2. Ingin memiliki sahabat untuk dirinya pribadi.
3. Membantu anak kandungnya memiliki teman.
4. Ingin menunjukkan rasa sosialnya, belas kasihannya kepada mereka yang menghadapi kesulitan sesuai dengan kemampuannya.

Tujuan pengangkatan anak ialah untuk memastikan kesejahteran untuk anak itu. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam “Undang-Undang(UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak”. Kemudian, tujuan tersebut dijelaskan pada “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Dalam “Pasal 39 butir (1) menjelaskan bahwa”:

“Pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sehingga, pasal ini menjamin bahwa pengangkatan anak tidak untuk menjadi formalitas hukum, tetapi untuk mencerminkan tanggung jawab dan sosial dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak yang telah diangkat.

1. **Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Di Indonesia**

Di Indonesia, persyaratan pengangkatan anak atau adopsi anak didasari pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917[[27]](#footnote-27) dan diatur secara khusus pada “Peraturan Pemerntah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pegangkatan Anak” dan “Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak”.[[28]](#footnote-28) Proses pengangkatan anak di Indonesia harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada aturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Syarat ini akan menentukan kesiapan calon orang tua angkat untuk melakukan proses pengangkatan anak. Syarat ini tidak hanya ditujukkan ke orang tua angkatnya saja, namun persyaratan ini juga ditujukkan untuk calon anak angkatnya. Syarat-syarat yang tercantum di undang-undang dan regulasi pengangkatan anak yaitu mengamankan hak-hak anak.

Pengangkatan anak di Indonesia diatur pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang diterbitkan melalui pemerintah Hindia Belanda, dengan ketentuan yang tercantum dari Pasal 5 hingga Pasal 15, dan hanya berlaku untuk warga keturunan Tionghoa . Pengaturan ini mencakup pasal-pasal yang menetapkan syarat-syarat pengangkatan, termasuk persetujuan orang tua biologis dan batasan usia antara individu yang mengadopsi dan anak yang diadopsi. Staatsblad bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa proses adopsi dilaksanakan dengan cara yang sah dan adil. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur prosedur pengangkatan anak dari Pasal 8 hingga Pasal 10. Pada Pasal 8, ada empat syarat yang diperlukan untuk menerima pengangkatan anak yaitu :[[29]](#footnote-29)

1. “Persetujuan orang yang mengangkat anak”.
2. “Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali”.
3. “Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan”.
4. “Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri”.
5. “Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat”.
6. “Menurut Pasal 10 staatsblad 1917 Nomor 129, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris”.

PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjadi acuan dalam proses pengangkatan anak. Tujuan dari peraturan pemerintah ini ialah memberi jaminan perlindungan dan kesejahteraan anak yang diangkat, serta memberikan kepastian hukum dalam proses pengangkatan. Ketentuan umum mencakup beberapa bentuk pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, proses pengangkatan anak, bantuan dalam menyelesaikan proses pengangkatan anak, dan pengawasan terhadap proses pengangkatan anak, semuanya diatur pada peraturan ini.[[30]](#footnote-30) Tujuan dari peraturan pemerintah ini ialah memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masa depan anak. Berdasarkan “Pasal 12 ayat (1)” PP tentang Pelaksanaan Anak Angkat, disebutkan syarat anak yang akan diangkat yaitu, meliputi :

1. “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun”
2. “Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan”
3. “Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan”
4. “Memerlukan perlindungan khusus”

Pengangkatan anak mengatur tentang batasan usia anak yang diangkat. Terdapat krietria umur anak agar dapat dilakukannya pengangkatan anak. Usia anak angkat telah diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007. Usia anak angkat yang dimaksud di atas dijelaskan pada “Pasal 12 ayat (2)” yaitu :

1. “Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama”
2. “Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan”
3. “Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus”.

Melaksanakan Pasal 18 PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial ini menjelaskan persyaratan calon anak angkat (CAA) dan calon orang tua angkat (COTA).[[31]](#footnote-31) PERMENSOS berfungsi untuk memberikan kerangka aturan yang jelas dalam prosedur pengangkatan anak di Indonesia, memastikan bahwa semua langkah diambil demi kesejahteraan dan perlindungan anak. Jenis pengangkatan dalam peraturan ini terdapat 2 (dua) yaitu antar Warga Negara Indonesia dan antar Warga Negara Indonesia(WNI) dan Warga Negara Asing(WNA). Pengangkatan antar WNI mencakup praktik yang dilakukan atas dasar adat dan kebiasaan atau peraturan perundang-undangan, sedangkan antar WNI dan WNA yaitu hanya dapat dilakukan dengan melalui lembaga perawatan anak. Syarat material untuk calon anak diatur dalam “Pasal 4 PERMENSOS Nomor 110/HUK/2009”, yang mencakup :[[32]](#footnote-32)

1. “Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun”
2. “Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan”
3. “Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak”
4. “Memerlukan perlindungan khusus”

Permohonan untuk pengangkatan anak wajib disertakan dengan persyaratan administratif Calon Anak Angkat dalam “Pasal 5, yang mencakup” :[[33]](#footnote-33)

1. “Copy KTP orang tua kandung/wali sah/kerabat calon anak angkat”.
2. “Copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat”.
3. “Kutipan akta kelahiran calon anak angkat”.

Pasal 6 menyebutkan Persyaratan Calon Anak Angkat , yang tercantum dalam “Pasal 4 huruf a, diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yang mencakup” :[[34]](#footnote-34)

1. “Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus”.
2. “Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar berada dalam situasi darurat”.
3. “Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus”.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7, persyaratan umum untuk Calon Orang Tua Angkat yaitu :[[35]](#footnote-35)

1. “Sehat jasmani dan rohani”.
2. “Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun”.
3. “Beragama sama dengan agama calon anak angkat”.
4. “Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan”.
5. “Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun”.
6. “Tidak merupakan pasangan sejenis”.
7. “Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak”.
8. “Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial”.
9. “Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak”.
10. “Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak”.
11. “Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat”.
12. “Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan”.
13. “Memperoleh izin Menteri atau kepala Instansi Sosial Provinsi”.

Penjelasan di atas merupakan persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Calon Orang Tua Angkat sebelum melakukan pengangkatan anak yang telah diatur dalam PERMENSOS.

1. **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

**1. Definisi Perlindungan Anak**

Perlindungan anak di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang. Undang-Undang tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan kepada anak[[36]](#footnote-36) dalam “Pasal 28B”, yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan”.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak juga memuat pengaturan terkait perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan kewajiban bersama-sama antara negara, orang tua, dan masyarakat untuk menjamin bahwa setiap anak berhak untuk merasakan hak-haknya secara penuh dan terlindungi dari segala bentuk ancaman.

UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002, “Pasal 1” menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak-anak wajib diberikqn kesempatan yang cukup agar dapat berkembang dengan sehat secara rohani, fisik, dan sosial karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan tujuan mulia bangsa, calon pemimpin di masa depan, serta sumber harapan untuk generasi sebelumnya. Seluruh masyarakat, menyadari betapa pentingnya anak-anak untuk masa depan bangsa dan negara. Jika merasa telah mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial saatnya mereka menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak dilakukan pada berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat karena itu merupakan bukti adanya keadilan dalam masyarakat. Dalam hal hukum tertulis dan tidak tertulis, tindakan untuk melindungi anak mempunyai konsekuensi hukum. Hukuman menjamin perlindungan anak. Arif Gosita menyatakan bahwa jaminan hukum harus dibuat untuk menjaga perlindungan anak tetap berjalan dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif.[[37]](#footnote-37) Perindungan anak terdiri dari dua bagian:[[38]](#footnote-38)

1. “Perlindungan anak secara hukum, yang mencakup: perlindungan dalam ranah hukum publik dan hukum perdata”.
2. “Perlindungan anak bersifat non-yuridis, yang mencakup: perlindungan dalam aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan”.

Perlindungan anak menguntungkan anak dan orang tuanya, kolaborasi yang terkoordinasi dalam upaya perlindungan anak sangat dibutuhkan dibuat untuk menghindari ketidakseimbangan dalam hal perlindungan anak. Terkait dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyatakan bahwa isu perlindungan hukum bagi anak-anak adalah salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak.[[39]](#footnote-39) Masalahnya tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang yuridis, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan anak, yaitu :[[40]](#footnote-40)

1. Lingkup perlindungan :
2. “Perlindungan utama mencakup hal-hal seperti: kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan hukum”.
3. “Mencakup kebutuhan fisik dan mental”.
4. “Terkait dengan pembagian antara kebutuhan primer dan sekunder yang menentukan prioritas dalam pemenuhannya”.
5. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
6. “Untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan jaminan atas penerapan perlindungan tersebut yang dapat dipahami dan dirasakan oleh semua pihak yang berkepentingan”.
7. “Jaminan tersebut sebaiknya dicantumkan dalam bentuk aturan tertulis, baik berupa undang-undang atau peraturan daerah, yang mudah dipahami namun dapat dipertanggungjawabkan, serta disosialisasikan secara luas kepada kelompok sosial”.
8. “Pengaturan tersebut perlu penyesuaian dengan kondisi dan keadaan di Indonesia, sambil tetap memperhatikan metode perlindungan yang diterapkan di negara lain, yang bisa dijadikan pertimbangan dan diadaptasi secara kritis”.

Definisi perlindungan anak menurut Arif Gosita dijelaskan:[[41]](#footnote-41)

1. “Keadilan sosial adalah prinsip dasar dari perlindungan anak”.
2. “Kerja sama untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya secara manusiawi dan positif”.
3. “Realitas sosial yang bersifat kemanusiaan. Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan anak mencakup mental, fisik, dan sosial, artinya berbagai bidang ilmu pengetahuan, sektor, dan kementerian terlibat dalam pendekatan dan pengasuhan anak”.
4. “Hasil dari interaksi antara pihak-pihak tertentu yang muncul akibat hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian, pemahaman, dan penghargaan terhadap semua pihak (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai bagian dalam adanya perlindungan anak tersebut”.
5. “Tindakan individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial tertentu, seperti motivasi yang didorong oleh kepentingan, lembaga sosial (keluarga, sekolah, agama, dan lain-lain)”.
6. “Dapat berupa kegiatan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum yang perlu diselesaikan menurut dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.
7. “Harus diupayakan pada beberapa aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, negara, maupun bangsa. Tingkat perlindungan anak di suatu masyarakat atau bangsa menjadi kriteria perkembangan masyarakat dan bangsa tersebut”.
8. “Merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Menghiraukan isu perlindungan anak dapat menganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat dan anak. Pasrtisipasi dalam pembangunan nasional adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara”.
9. “Merupakan bidang layanan yang bersifat sukarela secara umum, cakupannya dengan pendekatan baru yang inovatif”.

Terdapat 3 (tiga) dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak yaitu :[[42]](#footnote-42)

1. “Dasar Filosofis; Pancasila memberikan dasar filosofis untuk kegiatan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, serta perlindungan anak”.
2. “Dasar Etis; perlindungan anak harus dilakukan berdasarkan etika profesi yang relevan agar tidak ada perilaku yang menyimpang dari tanggung jawab”.
3. “Dasar Yuridis; perlindungan anak harus berlandaskan pada UUD 1945 dan undang-undang lain yang berlaku. Prinsip yuridis ini harus diterapkan secara menyeluruh, melibatkan peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang huku yang relevan”.

Anak bisa dilindungi secara langsung atau tidak langsung. Secara jelas, tujuannya adalah untuk menangani secara langsung anak-anak. Tindakan seperti ini dapat berupa berbagai cara untuk membimbing, mengarahkan, dan mengasuh anak, menghindari kelaparan dan menjaga kesehatannya, memberikan fasilitas pengembangan diri, dan lain-lain. Perlindungan anak secara tidak langsung adalah perlindungan yang ditujukan tidak langsung terhadap anak tetapi kepada orang lain yang bertanggung jawab untuk melindungi anak. Misalnya, orang tua atau pihak yang memiliki kewajiban untuk megasuh, membina dan mendampingi anak dalam berbagai cara, mencegah anak kelaparan, melindungi mereka dari ancaman yang didapat dari luar atau dalam diri mereka sendiri.

**2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Prinsip perlindungan anak merupakan landasan penting dalam menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Dalam Undang-Undang (UU) juga telah memuat tentang prinsip-prinsip perlindungan anak. Berikut ini adalah empat prinsip utama perlindungan anak yang tercantum dalam “Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu” :[[43]](#footnote-43)

1. Non diskriminasi

“Setiap anak setara dalam hak dan peluang, tanpa adanya perbedaan atau pengecualian, termasuk perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul nasional atau sosial, status kekayaan, cacat, atau kelahiran. Sejalan dengan ketentuan hukum, setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus”.

1. Kepentingan yang terbaik bagi anak

“Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh negara, pemerintah, pihak berwenang, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk keluarga. Potensi pengaruh dari kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keberlanjutan hidup anak dan perkembangan mereka”.

1. “Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan”

Negara mengakui bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemajuan anak-anak. Anak-anak membutuhkan keberadaan yang baik, perhatian yang tepat untuk kesejahteraan fisik dan mental, dan perkembangan pengetahuan.

1. Penghargaan terhadap pendapat anak

“Memberikan kesempatan pada anak-anak dalam memberikan pendapatnya, karena hal ini merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan merasa lebih percaya diri, serta dapat menerima perbedaan pendapat”.

**3. Hukum Perlindungan Anak**

Hukum perlindungan anak di Indonesia merupakan seperangkat peraturan yang dirancang untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak, dan melindungi mereka dari macam-macam kekerasan dan diskriminasi. Hukum perlindungan anak mencakup hukum adat, hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum pidana, serta hukum lain yang berkaitan dengan anak. Perlindungan anak mencakup berbagai sektor kehidupan dan penghidupan untuk memastikan bahwa anak dapat berkembang dan mencapai pertumbuhan yang optimal secara wajar sesuai dengan hak asasinya. Selain itu, hukum perlindungan anak juga menekankan pentingnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan mereka sesuai dengan martabat dan harkat manusia.

Arif Gosita menyampaikan pendapat “Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”. Berikut ini adalah beberapa penjabaran mengenai hukum perlindungan anak yang diberikan oleh Arif Gosita yaitu sebagai berikut :[[44]](#footnote-44)

1. “Hukum perlindungan anak merupakan isu kemanusiaan yang merupakan fakta sosial. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, hukum perlindungan anak mencakup aspek mental, fisik, dan sosial (hukum)”.
2. “Hukum perlindungan anak timbul sebagai hasil dari interaksi antara berbagai pihak, yang muncul akibat hubungan saling mempengaruhi antar fenomena yang ada”.
3. “Lembaga-lembaga kemasyarakatan (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dll), nilai-nilai kemasyarakatan, standar hukum, kedudukan, peran, dan pengaruh-pengaruh lainnya semuanya dapat berdampak pada perilaku seseorang, oleh karena itu terdapat undang-undang perlindungan anak”.
4. “Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum dengan konsekuensi yang harus ditangani dengan berkonsultasi dan mendasarkan keputusan pada peraturan yang relevan”.
5. “Karena undang-undang perlindungan anak hanya berfungsi sebagai landasan atau pedoman bagi mereka yang menerapkan perlindungan anak, maka undang-undang tersebut tidak dapat secara aktif melindungi anak-anak”.
6. “Hukum perlindungan anak ada pada beberapa cabang hukum, karena kepentingan anak menyentuh banyak aspek kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa”.
7. **Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak Dalam Berbagai Perspektif**

**1. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Banyak orang yang benar-benar ingin menjadi orang tua. Ketika beranjak dewasa, anak mewakili keberlangsungan keluarga dan menjadi harapan orang tuanya. Keluarga dengan anggota ayah, ibu dan keturunanya akan menjadikannya terasa lebih sempurna. Namun, beberapa orang belum memiliki keluarga yang sempurna karena belum diberikan anugerah dari Tuhan. Keluarga seperti ini biasanya memutuskan untuk mengadopsi anak dan prosedur adopsi harus mengikuti hukum yang berlaku saat ini.

Istilah pengangkatan anak dan anak angkat tidak ada dalam KUHPerdata. Hanya Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjadi pelengkap KUHPerdata yang mempunyai peraturan mengenai anak angkat .[[45]](#footnote-45) Staatsblad dibuat untuk melengkapi kekosongan hukum mengenai anak angkat karena KUHPerdata tidak mengatur hal ini. Aturan tersebut berfungsi sebagai acuan untuk pengangkatan atau adopsi anak oleh masyarakat yang patuh pada KUH Perdata. Berdasarkan apa yang tercantum dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, khususnya dalam Pasal 5-15 akan membahas mengenai kedudukan anak angkat didalam keluarga selanjutnya. Pasal 12 menjelaskan bahwa anak angkat memiliki status yang setara dengan anak asli atau anak yang dilahirkan berasal dari orang tua angkatnya.[[46]](#footnote-46)

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menyatakan bahwa anak angkat dianggap sebagai anak resmi dan bukan anak angkat, ikatan anak. Ikatan anak bersama orang tua biologisnya putus akibat proses pengangkatan anak,[[47]](#footnote-47) sehingga hanya menyisakan hubungan warisan dengan orang tua angkatnya saja . Setelah Majelis Hakim di Pengadilan membuat keputusan tentang pengangkatan anak, akta kelahiran harus memuat informasi yang sah tentang pengangkatan anak, termasuk nama orang tua angkatnya.

Sesuai dengan Pasal 14 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, ketika anak ditetapkan sebagi anak adopsi, hubungannya dengan ayah dan ibu biologisnya juga secara otomatis terhenti. Sebagai akibat dari proses penetapan anak di Pengadilan, bapak dan ibu angkat dan anak angkat mempunyai ikatan keluarga yang mirip dengan seorang anak dengan orang tua biologisnya. Anak angkat akhirnya memakai identitas keluarga orang tua angkatnya juga.

Pengangkatan anak menurut hukum perdata hanya dapat dilaksanakan melalui akta notaris dengan prosedur, terdiri atas:[[48]](#footnote-48)

1. Pihak terkait harus mengunjungi Notaris.
2. Jika ada pemeberian kuasa, harus disertai surat kuasa khusus yang dilengkapi materai.
3. Dalam akta tersebut harus mencantumkan persetujuan dari orang tua biologis dan orang tua angkat.
4. Dokumen ini disebut disebut sebagai akta adopsi.

Penetapan Pengadilan Negeri merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam tata cara pengangkatan anak. Anak angkat mempunyai hak dan tanggung jawab yang setara dengan anak biologis karena mereka dianggap menjadi anak yang baru lahir dalam keluarga angkatnya. Orang tua angkat memerlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan anaknya ke Kantor Catatan Sipil dan memperoleh status pengangkatan anak .[[49]](#footnote-49) Memberikan peluang kepada orang tua yang memiliki kemampuan untuk mengangkat anak adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah anak. Namun, ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah serta tradisi adat saat ini.

Peraturan Pemerinthah Nomor 54 Tahun 2007 memberikan pedoman penting untuk pengangkatan anak, hal itu mencakup aspek umum, jenis pengangkatan, persyaratan, prosedur, pengawasan dan pelaporan.[[50]](#footnote-50) Untuk menghindari perilaku yang tidak pantas, menjaga anak, dan meningkatkan kesejahteraan anak untuk masa dpannya, maka peraturan pemerintah ini bertujuan dalam memastikan prosedur adopsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 adalah penyempurnaan dari SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang ditetapkan pada 29 September 1983. SEMA ini diterbitkan untuk memberikan panduan kepada pengadilan negeri dalam menangani permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Dalam edaran ini, Mahkamah Agung mencatat adanya peningkatan jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan, baik sebagai bagian dari gugatan perkara maupun sebagai permohonan khusus. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan dapat mengurangi variasi dalam alasan pengangkatan anak dan meningkatkan konsistensi dalam praktik hukum terkait pengangkatan anak di Indonesia.

**2. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum Islam memandang pengangkatan anak sebagai pemeliharaan dan pengasuhan anak oleh pihak lain selain otang tua biologisnya, yang tidak merubah hubungan hukum, nasab/garis keturunan, dan status mahram antara anak angkat dan orang tua biologisnya. Yang berubah hanyalah ketika orang tua kandung menyerahkan kendali atas pengasuhan, pengawasan, dan pendidikan anaknya kepada orang tua angkat. Menurut hukum Islam anak angkat tetap memakai nama ayah aslinya, dan pengangkatan anak tidak ada kaitannya dengan ikatan wali, ahli waris, atau hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkat.[[51]](#footnote-51) Menurut hukum Islam apabila terdapat anak yang tidak tau asal-usulnya maka anak tersebut masuk ke dalam kelompok “anak pungut”. Anak pungut atau *al-Laqith* yaitu “anak yang dipungut dan tidak jelas asal-usulnya, karena anak tersebut ditemukan di pinggir jalan dan orang yang menemukannya mengakui sebagai anaknya, maka anak tersebut dapat menasabkan dengan orang tua yang telah menemukannya”.[[52]](#footnote-52)

Menurut ulama fikih, proses pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan pendidikan dan dukungan kepada orang tua kandung anak, sehingga anak dapat bergantung pada diri sendiri di masa depan. Secara hukum Islam, nasab anak tetap tidak berpindah dari bapak biologisnya ke ayah angkat .[[53]](#footnote-53) Ini berarti bahwa anak tersebut masih tetap menjadi mahram dan masih saling mewarisi dengan ayah kandungnya, serta ayah kandungnya tetap menjadi wali saat anak menikah apabila anak itu perempuan. Terdapat dua aspek yang berhubungan dengan anak angkat adalah dalam hal waris dan pernikahan. Hal ini berbeda dengan pandangan hukum perdata yang ada di Indonesia.

Menurut hukum fikih dalam Islam terdapat tiga faktor yang mengakibatkan adanya hal kewarisan yaitu :[[54]](#footnote-54)

1. Adanya ikatan kekeluargaan atau keturununan *al-qarabah*
2. Adanya keturunan dari perkawinan yang sah *al-mushaharah*
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan perwalian hamba sahaya oleh orang yang memerdekakannya

Anak angkat tidak tergolong dari tiga faktor tersebut, yang menyebabkan anak tidak akan mendapat hak kewarisan dari orang tua yang mengadopsinya. Karena anak angkat tetap akan mendapat warisan oleh orang tua kandungnya. Apabila anak tersebut menerima hak kewarisan dari orang tua angkatnya maka perbuatan tersebut telah melanggar aturan dalam hukum Islam. Kewarisan dan wali anak akan tetap berada di orang tua kandungnya, waris bukan merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh orang tua angkatnya.

Orang tua angkat dan anak angkat menjalin ikatan hukum melalui pengangkatan anak secara sah. Karena anak biologis dan anak angkat diperlakukan secara adil dan memiliki ikatan fisik dan emosional yang sama, hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat dapat disamakan dengan hubungan antara orang tua kandungnya. Hak dan tanggung jawab anak angkat dan orang tua angkatnya ditentukan oleh hubungan hukum ini . Anak angkat memiliki hak untuk mendapat pendidikan, perawatan, dan segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bila anak angkat sudah beranjak dewasa atau dapat hidup sendiri, maka anak memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat orang tua ketika tua nanti. Demikian juga pada orang tua angkatnya, mereka memiliki kewajiban setelah melakukan pengangkatan anak yaitu orang tua tidak diperbolehkan membedakan dalam segala hal, seperti memberi perhatian penuh, tanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah, pendidikan serta pelayanan di segala kehidupannya.

Ikatan orang tua angkat dan anak angkat akan semakin dekat, apalagi jika anak angkat tersbut dari keluarga dekat. Walaupun anak angkat tidak ada hak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya menurut hukum Islam, namun hubungan ini akan mendorong orang tua angkat untuk mewariskan harta warisan kepada anak angkatnya. Namun, dalam Islam memberikan kemungkinan bagi anak angkat untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat yang dibuat dan disampaikan oleh bapak angkatnya sebelum wafat. Hibah atau wasiat dilakukan sebagai tanda bentuk kebaikan dan kepedulian orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut, bahwa status anak angkat hanya memungkinkan mereka untuk menerima nafkah, perhatian, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi yang sama seperti anak lainnya. Hak-hak anak angkat tidak harus disamakan dengan anak biologis, karena orang tua angkat seringkali merasa sulit untuk melihat anak angkat sama seperti anak kandungnya. Syekh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa Islam bukan hanya sebuah kepercayaan atau akidah,tetapi juga syariah atau peraturan tentang cara manusia berinteraksi dengan tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta.[[55]](#footnote-55) Menurut hukum Islam, mengangkat anak dengan maksud menjadikannya anak sendiri dengan hak yang sama dengan anak biologis adalah dilarang. Pengangkatan anak dalam Islam hanya menekankan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lain demi kebaikan anak.

Menurut para ahli fiqih, hukum Islam tidak mengizinkan adopsi anak yang memiliki konsekuensi hukum yang sebanding dengan adopsi dalam sistem hukum sekuler atau barat. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat jahiliyah, dimana anak angkat diperlakukan sebagai anak biologis dan diberikan hak waris yang sama dengan anak lainnya serta orang tua kandung dan orang tua angkat berperan sebagai wali penuhnya.[[56]](#footnote-56) Pengangkatan anak dalam hukum Islam diartikan sebagai pengalihan kewajiban atas pengasuhan, pendidikan, dan tugas-tugas lain yang terkait anak, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Swt.

“Ayat 4-5 Surat Al- Ahzab (33)” memuat firman Allah SWT yang mengaharamkan pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak biologis yang sah, yang memiliki arti: *“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.[[57]](#footnote-57) Dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4-5 dan 37-40 tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam menetapkan garis panduan yang jelas mengenai pengangkatan anak bahwa adanya larangan dan anjuran dalam pengangkatan anak :[[58]](#footnote-58)

1. “Akibat anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki ikatan darah, maka anak angkat dilarang menggunakan nama orang tua angkatnya”.
2. “Ayat di atas mengatakan, anak angkat hanyalah individu lain yang berada di bawah asuhan kasih sayang, mereka bukanlah anak kandung. Karena hukum Islam tidak mengenal adanya hubungan hukum, maka anak angkat tidak berhak mendapat warisan dan hukum mahram tidak berlaku”.
3. “Anak angkat harus disebut dengan nama bapak biologisnya jika asal-usulnya masih jelas, atau jika identitas bapaknya tidak diketahui, maka ia dipanggil sebagai saudara seagama atau maula-maula, yang berarti seseorang yang telah dimerdekakan atau diangkat sebagai anak angkat”.
4. “Mantan istri anak angkat boleh saja menikah dengan ayah angkatnya. hal ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 37-40, dimana Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan untuk menikah dengan Zainab binti Jahsy, sebab Zainab binti Jahsy bukanlah salah satu wanita yang dilarang dinikahi Nabi Muhammad SAW, terbukti dari asal-usul anak angkat Nabi, Zaid bin Haritsah”.

Wahbah Az-Zuhaili, menyebutkan lima hak yang dimiliki anak pada orang tuanya seperti “hak nasab, hak radla, hak hadhanah, hak walayah, dan hak nafkah”. Menurut Az-Zuhaili[[59]](#footnote-59) yang utama, hak nasab adalah pengakuan atas ikatan seorang anak dengan garis keturunan bapaknya, yang menjadikan anak tersebut bagian dari keluarga berdasarkan keturunan. Kedua, hak radla’ adalah hak anak atas makanan pokok dengan pemberin susu oleh ibunya, ibu bertanggung jawab kepada Allah dalam hal ini baik pada saat masih menikah dengan ayahnya maupun setelah perceraian dan berakhirnya masa iddah. Ketiga, hak hadhanah yang dalam bahasa berarti menyimpan sesuatu dekat dengan tubuh, seperti menggendong atau memangku anak, dalam fiqih berarti kewajiban untuk merawat dan mengasuh anak dari lahir hingga anak tersebut mampu mengurus diri sendiri. Keempat, hak walayah yaitu tanggung jawab orang tua untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan anaknya sampai mencapai usia baligh, termasuk pemeliharaan dan pengaturan pengeluaran harta anak yang masih kecil, serta pengawasan pada perkawinan pada anak perempuan. Kelima, hak nafkah adalah kewajiban orang tua atau kerabat dekatnya untuk menafkahi anak.

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam mendukung dan mengamanatkan pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak terlantar demi kesejahteraannya, dengan tetap menjaga ikatan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Siapa pun yang mengetahui di mana anak itu berada, wajib menampungnya dan merawatnya, tanpa mengubah hubungan orang tua kandungnya atau garis keturunannya, jika tidak ada pihak lain yang bersedia melakukannya.

**3. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat**

Pengangkatan anak menurut hukum adat ialah apabila seorang anak diberi kedudukan yang setara seperti anak kandung, termasuk perhatian penuh, pendidikan, nafkah, dan pewarisan.[[60]](#footnote-60) Ada berbagai alasan orang melakukan pengangkatan anak yang timbul di Indonesia. Salah satu alasan masyarakat melakukan pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan keturunan. Di Indonesia, ada banyak suku yang memiliki adat istiadat dan sistem keluarga yang berbeda. Mereka biasanya termasuk dalam salah satu kategori ini :[[61]](#footnote-61)

1. Masyarakat yang menganut sistem keturunan melalui garis ayah (*patrilineal).*
2. Masyarakat yang menganut sistem keturunan melalui garis ibu (*materilineal).*
3. Mayarakat yang menganut sistem keturunan ibu dan ayah (*bilateral atau parental),* yang terdiri dari :
4. “Penduduk yang tersusun dari satuan berupa keluarga *(family* atau *gezin)”.*
5. “Penduduk yang tersusun dari satuan berupa suku (*tribe*)”.

Masyarakat yang menganut garis keturunan ayah juga disebut sebagai masyarakat *patrilineal*. *Patrilineal* memiliki sistem kekerabatan unilateral yang bergantung pada garis keturunan (darah) dari pihak pria atau ayah. Dalam hal ini, untuk hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayah menjadi sangat signifikan. *Clan* dan *lineage* adalah dua bentuk kelompok kerabatnya.  *Lineage*  adalah silsilah keluarga yang terdiri dari orang-orang yang hubungannya dapat diidentifikasi dengan nyata, sedangkan *clan*  hanyalah bentuk tradisonal. Orang Tapanuli, Lampung, Bali dan Ambon adalah contoh masyarakat unilateral-patrilineal ini.[[62]](#footnote-62)

Masyarakat dengan sistem keturunan ibu *(matrilineal*), yang mengikuti sistem kekerabatan unilateral dengan mengambil garis keturunan (dara) dari pihak ibu atau perempuan. Hal ini memiliki bentuk kekerabatan yang sama dengan yang disebutkan di atas dalam masyarakat *patrilineal*. Dalam kasus ini, anak atau keturunan perempuan tidak penting, begitu pula kerabat bapak tidak penting. Yang penting adalah anak atau garis darah perempuan dan keluarga atau kerabat ibu. Orang Minangkabau, Kerinci, dan Semendo adalah contoh masyarakat *unilateral-matrilineal*.

Masyarakat dengan sistem keibu-bapaan (*bilateral, parental* atau *dubbelunilateraal*) memiliki garis keturunan dari bapak dan ibu, jadi dari laki-laki dan perempuan. Pada titik ini, kelompok kekerabatan terdiri dari keluarga (*family* atau *gezin*) sebagai satu kesatuan sanak saudara, seperti yang terlihat pada masyarakat Jawa (seperti orang Sunda di Jawa Barat), dan suku (tibe) yaitu satuan keluarga yang terdiri dari 10-12 keluarga, seperti yang terlihat pada orang Dayak di Kalimantan.[[63]](#footnote-63) Mengenai hal tersebut “keluarga” (*family* atau *gezin*) harus dimaknai menjadi “keluarga *konyugal* (*conjugal family*) sebagaimana dijelaskan oleh Emile Durkheim, bukan “keluarga *konsanguin*” (*consanguin family*).

Alasan mengangkat anak dalam hukum adat ada tiga belas yang terdiri atas:[[64]](#footnote-64)

1. Tidak memiliki anak. Ini adalah penjelasan yang populer karena ini adalah satu-satunya pilihan bagi pasangan tanpa anak untuk bahagia dan menjadikan rumahnya lebih hidup.
2. Keadaan di mana anak-anak merasa kasihan kepada orang tuanya karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berdasarkan kesepakatan yang tulus antara orang tua angkat dan orang tua kandung, hal ini memiliki alasan yang baik yaitu selain untuk membantu anak, dapat juga meringankan beban orang tua kandung.
3. Karena empati, situasi dimana anak-anak tidak memiliki orang tua, ini bukan sekedar tugas kemanusiaan bagi mereka yang mampu tapi juga tugas moral.
4. Anak perempuan diangkat ataupun sebaliknya, karena mereka hanya mempunyai anak laki-laki. Mengingat sebagian besar individu menginginkan anak laki-laki dan perempuan, hal ini termasuk normal.
5. Memungkinkan sebagai pancingan kepada keluarga yang tidak memiliki anak untuk memiliki anak kandung. Keyakinan mereka terkait dengan tujuan ini.
6. Meningkatkan anggota keluarga. Hal ini disebabkan oleh kekayaan orang tua angkatnya.
7. Memastikan anak yang diadopsi memperoleh pendidikan yang memadai. Ini karena alasan yang terkait dengan tujuan kemanusiaa.
8. Karena unsur kekayaan. Dalam situasi ini, adopsi biasanya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup baik orang tua angkat maupun anak angkat.
9. Memperoleh ahli waris dan meneruskan garis keluarga bagi orang-orang yang tidak mempunyai keturunan biologis.
10. Merupakan tugas kemanusiaan juga bagi orang tua kandung dari anak angkat untuk meminta anggota keluarga lain untuk mengadopsi jika masih ada ikatan keluarga.
11. Dipercayai bahwa anak-anak akan membantu orang tua angkat mereka di tahun-tahun terakhir mereka dan meneruskan tradisi keluarga bagi mereka yang tidak memiliki anak. Dengan demikian, terjadi timbal balik antara jaminan perlindungan orang tua angkat di kehidupan tua dengan kesejahteraan anak.
12. Ada rasa empati terhadap penderitaan anak-anak yang tidak diawasi. Dimana orang tua masih hidup tetapi tidak mampu atau lalai sehingga menyebabkan anak merasa ditinggalkan, dapat disebut diabaikan. Anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia juga terkena dampaknya.
13. Apabila anak kandung sakit, maka anak tersebut dapat diberikan kepada orang tua angkat atau orang lain yang tidak mempunyai anak dengan harapan agar anak tetap sehat dan panjang umur.

Ter Haar menyatakan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi adopsi anak di berbagai wilayah, terdiri atas:[[65]](#footnote-65)

1. Ketakutan bahwa keluarga tersebut akan punah, hal ini merupakan kekuatan pendorong di balik adopsi.
2. Kekhawatiran meninggal tanpa memiliki anak dan takut kehilangan garis keturunan.

Tradisi dan adat istiadat setempat biasanya diikuti ketika mengadopsi anak dan prosedurnya sering kali ditandai dengan ritual adat atau upacara selamatan. Setelah pengumuman pengangkatan anak oleh kepala desa, anak tersebut akan diserahkan oleh orang tua aslinya dan disambut oleh orang tua angkatnya pada saat upacara serah terima anak. Ini adalah pengangkatan secara resmi. Tindakan pengangkatan anak sesuai dengan hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia, seperti :[[66]](#footnote-66)

1. “Di Jawa dan Sulawesi, adopsi jarang dilakukan tanpa sepegetahuan kepala desa. Mereka biasanya mengadopsi dari kalangan keponakan, dan umumnya tanpa memberikan uang atau barang kepada orang tua biologi anak tersebut”.
2. “Di Bali, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *“nyentanayang”.* Anak yang diangkat biasanya berasal dari *clan* yang memiliki kaitan tradisonalnya yaitu (*pancer* laki-laki), namun sekarang juga dapat berasal dari kerabat istri (pradana)”.

Berikut dampak dari pengangkatan anak menurut hukum ada, terdiri atas:[[67]](#footnote-67)

1. Dengan orangtua kandungnya

“Anak yang telah diadopsi oleh orang lain berhenti berhubungan dengan orang tua kandungnya. Ini berlaku setelah proses pengangkatan anak secara terang dan tunai. Orang tua angkat mengambil peran orang tua kandung. Ini terjadi di Nias, Gayo, Lampung, dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangganya saja, namun hal ini tidak berarti bahwa ia tidak lagi mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua aslinya. Hanya interaksi sehari-hari yang diperbolehkan dengan orang tua angkat, orang tua kandung tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengasuhan, pendidikan, atau pengasuhan anak angkat”.

1. Dengan orang tua angkatnya

“Anak angkat mempunyai hak kewarganegaraan dan hak waris yang sama dengan anak kandung. Hal ini terlihat dari pengangkatan anak yang merupakan suatu prosedur hukum di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Pulau Bali, yang melepaskan anak angkat dari ikatan kekeluargaannya dan mempertemukan kembali dengan sanak saudara dari orang tua angkatnya sehingga ia menjadi anak kandung. Misalnya saja di Lampung, pengangkatan anak menyamakan ikatan anak dengan orang tua kandungnya dengan orang tua angkatnya. Anak angkat memperoleh harta kekayaan dari orang tua angkatnya, bukan dari orang tua kandungnya”.

Status anak angkat sama dengan anak kandung sesuai dengan kedudukan yang diberikan masyarakat hukum adat dalam hukum adat, mereka menjadi pewaris dan berhak atas sebagian harta warisan orang tua angkatnya, sama seperti anak biologis. Namun dalam masyarakat tradisional yang tidak mengakui anak angkat sebagai anak kandung, maka anak angkat tidak memiliki hak atas sebagian harta warisan orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak mempunyai dampak yang signifikan pada status anak angkat. Pengangkatan anak melalui upacara adat yang disaksikan oleh kepala adat dan anggota keluarganya dianggap sah.

1. Nurhalimah, N., Arifin, Z., & Noor, Z. (2023). *Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak/Adopsi: Studi Kasus di Pengadilan Kota Bogor No 143/Pdt. G/2021/PN Bogor.*Hukum dan Demokrasi (HD), 23(3), 146-159. DOI : <https://doi.org/10.61234/hd.v23i3.25>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Paputung, M. (2024). P*erlidnungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pegadilan Dalam Perspektif Normatif.* Jurnal Huku Ius Publicum, 5 (2). DOI : <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.150>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Risty, A. *Upaya Pembatalan Adopsi Anak Oleh Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan Pengadilan*. (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80852](%20https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80852). [↑](#footnote-ref-3)
4. Safarianingsih, R. (2022). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.*Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 10(2). DOI : <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684> [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Pamungkas, W.A. (2024) *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata.* Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. [↑](#footnote-ref-6)
7. Iqlima Ratu, G. (2024). *Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt. G/2022/Pn. Njk)*. (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/473790> [↑](#footnote-ref-7)
8. Risty, A, *op.cit.,* [↑](#footnote-ref-8)
9. Saputra, M. R. A., Chalid, F. I., & Budianto, H. (2023). *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*, hlm. 248. Nizamia Learning Center. [↑](#footnote-ref-9)
10. Siddiq-Armia, M. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum.* Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nursyafitri, G.D (2022). *Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli.* Retrieved from dqlab.id: https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli. Diakses pada 03 Oktober 2024, Pukul 23.38 wib. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jaya, I.M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta, hlm.6 [↑](#footnote-ref-12)
13. Yasin, A. A. (2021). *Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam.* *T*saqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 3(1), 81-89, hlm. 83. DOI : <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>. [↑](#footnote-ref-13)
14. Khasanah, A. N., & al-Amin, H. (2023). *Proses Anak Angkat Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.* Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 18(2), 16-29,hlm. 19. DOI : [https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.484](https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.4849) [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-15)
16. Kamil, A., & Fauzan, H.M. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia.* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* hlm. 56. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* hlm.95. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* hlm.96. [↑](#footnote-ref-20)
21. Supriyadi, I. (2020). *Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam.* The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(1), 18-36. DOI : <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139> [↑](#footnote-ref-21)
22. Khasanah, A. N., & al-Amin, H, *op.cit.,* hlm.20. [↑](#footnote-ref-22)
23. Amir, S. A. H. H., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2021). *Studium Causa Pengangkatan Anak.* Jurnal Litigasi Amsir, 9(1), 77-81. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/60. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Safarianingsih, R. (2022). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan.*Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), hlm. 34.DOI : <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.684> [↑](#footnote-ref-26)
27. ## Saksono, I. G., & Widyastuti, T. V. (2023*). Kompleksitas Penetapan Hukum Anak Angkat Di Pengadilan.*Pancasakti Law Journal (PLJ), 1(2), 287-294.

    [↑](#footnote-ref-27)
28. ## Apriliana, B. F., & Djamiko, A. A. (2024). *Implementasi Dan Faktor-Faktor Penentu Dalam Sistem Adopsi Menurut Regulasi Yang Berlaku. Sultan Adam:* Jurnal Hukum dan Sosial, 2(1), 153-159.

    [↑](#footnote-ref-28)
29. ## Thias, D. A., Hidayat, A., Abas, M., & Targana, T. (2023). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuh Perdata.* Rechtscientia: Jurnal Mahasiswa Hukum, 3(1), 97-110.

    [↑](#footnote-ref-29)
30. ## Lubis, D. (2023). *Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan.* Jurnal Ilmiah METADATA, 5(3), 110-125. DOI: <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.397>.

    [↑](#footnote-ref-30)
31. Apriliana, B. F., & Djamiko, A. A, *op.cit., hlm.156.* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid,* hlm. 157. [↑](#footnote-ref-35)
36. ## Mayasari, D. E., Atjengbharata, A. L., & Moelyono, T. H. (2021). *Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar.* Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 284-294.

    [↑](#footnote-ref-36)
37. Gultom, G. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* PT Refika Aditama, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid*, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-38)
39. ## Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia.* Justitia Jurnal Hukum, 3(2). DOI : <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3648>

    [↑](#footnote-ref-39)
40. Gultom, G, *op.cit.,* hlm.35. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid,* hlm.36. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid,* hlm. 37. [↑](#footnote-ref-42)
43. ## Pungkas, D., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2024). *Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Yang Ada di Indonesia.* Jurnal Bevinding, 1(11), 66-73, hlm. 69.

    [↑](#footnote-ref-43)
44. Gultom, G, *op.cit.,* hlm. 44. [↑](#footnote-ref-44)
45. Aisyah, N. (2020*). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata.* El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 101-113, hlm.106. DOI : <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137> [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-46)
47. Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). *Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat.* Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 15(01), 1-12, hlm.7.DOI: <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9204> [↑](#footnote-ref-47)
48. Pertiwi, A. N., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). *Kekuatan Hukum Testament (Surat Wasiat) Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Menurut KUHPerdata.* MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7(1), 91-104, hlm. 100. DOI : <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i1.4197>. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid,* hlm.101. [↑](#footnote-ref-50)
51. Zainuddin, N. A., Abbas, I., & Zainuddin, Z. (2020). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim.*Journal of Lex Generalis (JLG), 1(7), 959-974, hlm. 966. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i7.277>. [↑](#footnote-ref-51)
52. Kamil, A., & Fauzan, H.M, *op.cit,* hlm.101. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-54)
55. Wahyudani, Z., Zulfikar, Z., & Ramadan, A. (2022). *Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam.* FENOMENA, 14(1), 59-88, hlm. 75. DOI : <https://doi.org/10.21093/fj.v14i1.5166>. [↑](#footnote-ref-55)
56. Kamil, A., & Fauzan, H.M, *op.cit,* hlm.113. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid,* hlm.112. [↑](#footnote-ref-57)
58. Wahyudani, Z., Zulfikar, Z., & Ramadan, A. *op.cit,* hlm. 76. [↑](#footnote-ref-58)
59. Islam, E. S. H. H. (2019). *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. lentera, 1(2), 128-140, hlm. 137.DOI: <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2105> [↑](#footnote-ref-59)
60. Ritonga, R. A. H., Idris, I., & Suryahartati, D. (2021). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam).*Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2(3), 512-525, hlm. 518. DOI : <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.16003> [↑](#footnote-ref-60)
61. Pandika, R. (2022). *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika, hlm. 37.https://books.google.co.id/books?id=Ln6REAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=6xgCVZ214K&dq=hukum%20pengangkatan%20anak&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=hukum%20pengangkatan%20anak&f=false [↑](#footnote-ref-61)
62. *Ibid,* hlm. 38. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid,* hlm.39. [↑](#footnote-ref-63)
64. Poespasari, D.,E. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Kencana, hlm.292. [↑](#footnote-ref-64)
65. Prasetyo, A. B. (2019). *Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.* Diponegoro Private Law Review, 4(1), hlm. 377. [↑](#footnote-ref-65)
66. Poespasari, D.,E. *op.cit.* hlm. 295. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Ibid,* hlm.299. [↑](#footnote-ref-67)